

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

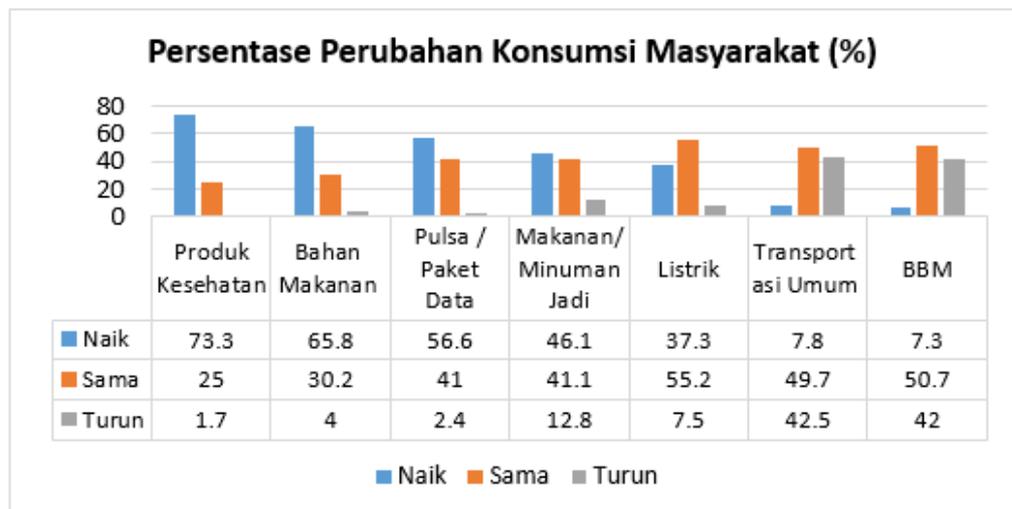
#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengandalkan perpajakan sebagai sumber pendapatan utamanya. Perpajakan menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang keberadaannya sangat diharapkan dapat mendukung belanja negara dan pembangunan nasional. Namun, sejak pandemi Covid 19 penerimaan pajak tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan 15% di bawah target APBN. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga 23 Desember 2020 85,65 persen dari tujuan APBN atau Rp 1.019,56 triliun dihimpun dari pajak. Angka ini lebih rendah dari penerimaan pajak yang dicapai per 30 November 2019 sebesar Rp 1.312,4 triliun (Kompas.com). Sebagai sumber utama penerimaan negara, pemerintah telah berupaya menjaga stabilitas dan mendorong penerimaan pajak dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memungkinkan pemerintah (dalam hal ini Direktorat Pajak) untuk memenuhi tujuan dari target penerimaan perpajakan yang ditetapkan.

Selain penerimaan pajak yang menurun akibat dari dampak pandemi Covid-19 dunia usaha juga menghadapi persaingan yang ketat di pasar global, khususnya manufaktur di industri sektor barang konsumsi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dilaporkan berdampak pada tingkat mobilitas penduduk, menurut (Katadata.co.id). Selain itu, ini mempengaruhi bagaimana pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Berikut adalah data persentase perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi pada tahun 2020.

## Persentase Perubahan Konsumsi Masyarakat (%)

Tahun 2020



Gambar 1.1 Persentase Perubahan Konsumsi Masyarakat

Sumber: Katadata.co.id

Berdasarkan informasi pada gambar di atas menunjukkan bahwa, pandemi COVID-19 mengubah cara individu memenuhi kebutuhan mereka akan makanan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi produk kesehatan naik 73,3%, bahan makanan naik sebesar 65,8%, pulsa/paket data naik sebesar 56,6%, makanan dan minuman naik sebesar 46,1%, listrik naik sebesar 37,3%. Sementara penggunaan angkutan umum mengalami peningkatan sebesar 7,8% dan Bahan Bakar Minyak hanya meningkat sebesar 7,3%. Konsumsi makanan, obat-obatan, dan pulsa melonjak lebih dari 50%.

Produk kesehatan, bahan santapan, pulsa ataupun kuota internet, hidangan cepat saji serta minuman menggambarkan 5 produk paling atas dengan persentase transformasi konsumsi paling tinggi. Dari jumlah tersebut 3 barang konsumsi merupakan output dari perusahaan- perusahaan di sektor industri barang konsumsi. Perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) menjadi salah satu sub sektor manufaktur. Penulis memilih sektor industri barang konsumsi selaku objek

riset ini sebab produk yang dihasilkan pada industri ini bersifat consumable serta mempunyai tingkatan penjualan yang besar serta dapat mempengaruhi perkembangan industri manufaktur.

Karena dampak lain yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang tidak terduga juga telah menyebabkan krisis ekonomi, praktik bisnis dalam situasi ini juga terpengaruh. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia meliputi terganggunya pada sistem korporasi yang berujung pada depresiasi mata uang, volatilitas pasar keuangan, dan pelarian *capital flight*. Mengingat situasi pandemi yang sedang terjadi, bisnis perlu mengambil pendekatan yang lebih proaktif untuk perencanaan, mengembangkan kebijakan ekonomi dan strategi bisnis yang efektif. Setiap keputusan yang diambil mempengaruhi keputusan keuangan lainnya yang juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan juga harus dapat mengelola keuangannya dengan baik. Dengan kata lain, kebijakan pengelolaan keuangan wajib menjamin keberlangsungan operasi perusahaan, yang ditunjukkan dengan tingkatan keuntungan ataupun profit perusahaan. Manajemen bertanggung jawab atas pentingnya informasi laba yang dimasukkan dalam laporan keuangan karena laba digunakan untuk mengukur kinerja manajemen. Oleh karena itu, Menurut (Putra, 2019) istilah manajemen laba memungkinkan manajemen bertindak untuk kepentingannya. Sehingga, penulis tertarik menggunakan manajemen laba sebagai variabel terikat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba.

Menurut Djamaluddin (2008: 58) dalam manajemen laba, peraturan perpajakan berbeda dengan akuntansi komersial, yang menghasilkan koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi negatif menyebabkan terjadinya kewajiban pajak tangguhan, dan koreksi positif menyebabkan terjadinya aset pajak tangguhan. Menurut Waluyo (2008: 217) aset yang perbandingan waktunya menciptakan koreksi positif yang menyebabkan beban pajak bagi akuntansi komersial yang lebih kecil dibanding beban pajak bagi undang-undang perpajakan merupakan definisi aset pajak tangguhan. Menurut Putra

(2019) bonus dan beban politis terkait besarnya perusahaan mendorong manajemen meningkatkan aset pajak tangguhan, sehingga memotivasi manajemen untuk menerapkan manajemen laba. Riset yang dilakukan oleh Putra (2019) membuktikan jika aset pajak tangguhan memiliki pengaruh atas manajemen laba. Sedangkan menurut Chahyani (2018) mendeteksi bahwa aset pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh atas manajemen laba.

Menurut Baradja, dkk (2017) dalam Setyawan et al (2021), perencanaan pajak menjadi aspek berikutnya yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Perencanaan pajak adalah seperangkat strategi guna mengatur akuntansi serta keuangan industri secara legal dengan cara meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum (secara hukum). Karena pajak merupakan faktor dalam mengurangi laba yang tersedia, maka tujuan perencanaan pajak ialah untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan peraturan yang terdapat guna meminimalkan penghasilan setelah pajak. Semakin besar tingkat perencanaan pajak, semakin besar kemungkinan industri guna menerapkan manajemen laba. Sutrisno et al (2018) menemukan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh atas manajemen laba. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Setyawan et al (2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara perencanaan pajak atas manajemen laba.

Selain perencanaan pajak yang diduga bisaengaruhi manajemen laba leverage juga diyakini selaku aspek yang dapatengaruhi manajemen laba. Riset ini sejalan dengan riset menurut Afrizal (2018) yang menyatakan jika pada saat perusahaan mempunyai leverage yang tinggi, maka perusahaan lebih memilah untuk menerapkan manajemen laba sebab perusahaan takut tidak akan sanggup melunasi utangnya tepat waktu serta tidak akan sanggup memenuhi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, rasio leverage menampilkan resiko yang dialami perusahaan sehubungan dengan hutang yang dimiliki perusahaan. Riset yang dilakukan oleh Afrizal (2018) mendeteksi bahwa terdapat pengaruh leverage atas manajemen laba.

Sebaliknya menurut Suyoto & Dwimulyani (2019) menemukan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh atas manajemen laba.

Bersumber pada uraian di atas, peneliti tertarik guna melaksanakan riset yang berjudul **“Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba pada Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun 2017- 2020”**.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Permasalahan utama yang hendak dikaji serta dianalisis dalam riset ini ialah menyangkut pengaruh aset pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan leverage terhadap manajemen laba.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apakah ditemukan dampak yang signifikan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
2. Apakah ditemukan dampak yang signifikan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
3. Apakah ditemukan dampak yang signifikan *leverage* terhadap manajemen laba pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020?
4. Apakah ditemukan dampak yang signifikan aset pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan *leverage* secara simultan terhadap manajemen laba pada sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2017-2020?

## **1.5 Tujuan Masalah**

Penelitian ini dimiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah aset pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2017-2020.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2017-2020.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2017-2020.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah aset pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan *leverage* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2017-2020.

### **1.6 Manfaat/Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya.
  - b. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya manajemen perpajakan yang dapat dijadikan acuan penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan penelitian bagi pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dibidang perpajakan yang akan datang.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagi perpajakan dan akuntansi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selanjutnya.